

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PROGRAM PELATIHAN KERJA OLEH DINAS TENAGA KERJA DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI PENCARI KERJA DI KOTA BANDUNG

Desviananda Katvi Maharani¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Program Pelatihan Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dalam Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja di Kota Bandung*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara tujuan Program Pelatihan Kerja dengan hasil yang dicapai, terutama dalam peningkatan kompetensi peserta dan keberlanjutan penempatan kerja setelah pelatihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan daerah tentang Program Pelatihan Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam meningkatkan kompetensi pencari kerja. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif berdasarkan teori implementasi kebijakan Riant Nugroho. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Pelatihan Kerja telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang ditetapkan melalui pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Namun, implementasi program masih menghadapi kendala berupa belum optimalnya koordinasi lintas organisasi, pemantauan alumni, dan keberlanjutan penempatan kerja sehingga kontribusi program terhadap penyerapan tenaga kerja maupun upaya menekan angka pengangguran belum dapat diidentifikasi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi serta optimalisasi sistem monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dapat berjalan lebih optimal.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Program Pelatihan Kerja, kompetensi pencari kerja, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, peningkatan kompetensi.

Abstract

This research is entitled Implementation of Local Government Policy on the Job Training Program by the Department of Manpower in Improving the Competence of Job Seekers in Bandung City. The study was motivated by the gap between the objectives of the Job Training Program and its outcomes, particularly in improving participants' competence and ensuring sustainable employment after training. This study aims to analyze the implementation of the local government policy on the Job Training Program conducted by the Department of Manpower of Bandung City in improving the competence of job seekers. This research employed a descriptive method with a

qualitative approach based on Riant Nugroho's policy implementation theory. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies. The findings indicate that the Job Training Program has been implemented in accordance with established procedures through training tailored to labor market needs. However, the program still faces challenges related to inter-organizational coordination, alumni monitoring, and sustainable employment placement, making its contribution to employment absorption and unemployment reduction difficult to assess comprehensively. Therefore, strengthening coordination and optimizing the monitoring and evaluation system are necessary to improve the implementation of the Job Training Program.

Keywords: Policy implementation, Job Training Program, job seeker competence, Department of Manpower of Bandung City, competency improvement.

PENDAHULUAN

Permasalahan ketenagakerjaan menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan daerah karena berkaitan dengan penyediaan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan masyarakat tidak hanya mendapatkan kesempatan kerja, tetapi juga memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Komitmen tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja melalui penyelenggaraan pelatihan kerja sebagai salah satu upaya dalam menekan angka pengangguran (Pemerintah Daerah Kota Bandung, 2018).

Kebijakan merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat melalui tindakan yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut (Sore dan Sobirin, 2017), kebijakan merupakan serangkaian keputusan atau tindakan yang dirumuskan oleh pemerintah maupun organisasi sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui program pelatihan kerja menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan ketenagakerjaan di daerah.

Fenomena tersebut juga terlihat di Kota Bandung sebagai salah satu kota metropolitan di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai peran penting sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif. Berdasarkan (Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2024), Kota Bandung

memiliki potensi sumber daya manusia yang besar dengan jumlah penduduk dan angkatan kerja yang cukup tinggi. Selain itu, (Pemerintah Daerah Kota Bandung, 2021) tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi kreatif berbasis inovasi masyarakat. Kondisi tersebut memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun di sisi lain juga meningkatkan persaingan pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensinya.

Permasalahan tersebut tergambar dari kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bandung yang meskipun mengalami penurunan, namun masih berada pada angka yang relatif tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Bandung, TPT Kota Bandung mengalami penurunan dari 8,83% pada tahun 2023 menjadi 7,40% pada tahun 2024 dan 7,22% pada tahun 2025 (Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2025). Penurunan sebesar 0,18% dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mengurangi pengangguran masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut juga belum sepenuhnya sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2024-2026 yang menempatkan peningkatan kualitas tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja (Pemerintah Kota Bandung, 2024).

Perkembangan teknologi, digitalisasi, serta perubahan kebutuhan dunia usaha mendorong terjadinya perubahan terhadap kompetensi yang dibutuhkan di pasar kerja. Berdasarkan *Future of Jobs Report 2025* yang diterbitkan oleh *World Economic Forum*, dunia kerja saat ini tidak lagi hanya menekankan pendidikan formal, tetapi juga kemampuan teknologi, kreativitas, berpikir analitis, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan industri (World Economic Forum, 2025). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas tenaga Kerja kota Bandung menyelenggarakan Program Pelatihan berbasis Kompetensi sebagai implementasi kebijakan daerah untuk meningkatkan kualitas kompetensi pencari kerja agar lebih siap memasuki dunia kerja maupun berwirausaha.

Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung menyelenggarakan Program Pelatihan Kerja berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program tersebut terlihat dari peningkatan pagu anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), pagu anggaran meningkat dari Rp20.976.604.814 pada tahun 2023 menjadi Rp45.803.024.999 pada tahun 2024, kemudian kembali meningkat menjadi Rp64.111.925.884,80 pada tahun 2025 (Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, 2025). Peningkatan anggaran tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam mendukung pelaksanaan Program Pelatihan Kerja sebagai upaya meningkatkan kompetensi pencari kerja. Namun, besarnya alokasi anggaran yang ada belum sepenuhnya menggambarkan keberhasilan implementasi kebijakan apabila belum diikuti dengan pencapaian tujuan program secara optimal.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Salsabila; Hertati, 2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pelatihan Berbasis Kompetensi telah berjalan cukup efektif dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja. Namun demikian, penelitian tersebut masih menemukan kendala berupa keterbatasan fasilitas praktik dan jumlah instruktur bersertifikat sehingga proses pembelajaran belum berlangsung secara optimal. Penelitian tersebut berfokus pada efektivitas pelaksanaan pelatihan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK). Sementara itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada implementasi kebijakan Program Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, khususnya pada aspek koordinasi antarorganisasi, kapasitas pelaksana, monitoring alumni, serta keberlanjutan penempatan kerja. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang berbeda dalam menganalisis implementasi kebijakan pelatihan kerja di tingkat pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Program Pelatihan Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dalam Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja di

Kota Bandung. Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting yang menghubungkan antara perumusan kebijakan dengan hasil yang akan dirasakan oleh kelompok sasaran. Edward III (dalam Syahrudin, 2017) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan lanjutan yang menghubungkan antara perumusan kebijakan dengan akibat atau hasil yang akan dirasakan oleh kelompok sasaran. Pada tahap ini, kebijakan mulai dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, terdapat berbagai pandangan dalam memahami implementasi kebijakan, salah satunya melalui teori implementasi kebijakan Riant Nugroho yang digunakan dalam penelitian ini karena memiliki empat dimensi yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu aktivitas implementasi dan koordinasi antarorganisasi, karakteristik dan kapasitas agen pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, serta kecenderungan para pelaksana/implementor (Nugroho, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui dan memahami implementasi kebijakan program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam meningkatkan kompetensi pencari kerja. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, khususnya pada Bidang Pelatihan dan Produktivitas (LATAS) sebagai bidang yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan program pelatihan kerja. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *snowball sampling* yang terdiri atas Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas, Penelaah Teknis Kebijakan/Ketua Tim Pelatihan Kerja dan Pemagangan, Instruktur Pelatihan, Kepala Subbagian Umum Kepegawaian, serta peserta pelatihan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan mengacu pada pandangan (Sugiyono, 2019) yang meliputi analisis pra lapangan, analisis data selama di lapangan, dan analisis setelah penelitian. Sementara itu, untuk menguji keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data hasil

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Program Pelatihan Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dalam Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja di Kota Bandung.

PEMBAHASAN

Pembahasan ini disusun berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Program Pelatihan Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dalam Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja di Kota Bandung dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan Riant Nugroho.

1. Aktivitas Implementasi dan Komunikasi Antar Organisasi

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Program Pelatihan Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dalam Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja di Kota Bandung sudah dilaksanakan sesuai standar dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), mekanisme seleksi peserta melalui aplikasi *New Bimma*, serta penentuan jenis pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Standar tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan program sehingga setiap tahapan kegiatan dapat berjalan lebih terarah. Selain itu, penyesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi peserta agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Komunikasi antar organisasi dalam pelaksanaan program pelatihan kerja sudah dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), DPRD sebagai pihak pengusul kegiatan, serta masyarakat sebagai peserta pelatihan. Koordinasi dilakukan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program. Penyampaian informasi kepada masyarakat juga dilakukan

melalui aplikasi *New Bimma*, dan media sosial sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pelatihan.

Meskipun demikian, komunikasi yang dilakukan belum sepenuhnya berjalan optimal, khususnya setelah pelatihan selesai dilaksanakan. Pemanfaatan aplikasi *New Bimma* sebagai media pelaporan perkembangan alumni masih belum berjalan secara konsisten sehingga Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung belum dapat melacak kondisi peserta secara menyeluruh setelah mengikuti pelatihan. Hal tersebut menyebabkan informasi mengenai perkembangan peserta setelah mengikuti pelatihan belum terdokumentasi secara menyeluruh, sehingga dapat mempengaruhi ketersediaan data sebagai bahan evaluasi dalam pengembangan program pelatihan kerja pada periode berikutnya.

2. Karakteristik Agen Pelaksana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik agen pelaksana berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Program Pelatihan Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dalam Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja di Kota Bandung. Struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas sesuai fungsi, serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi dasar dalam pelaksanaan program. Setiap pelaksana menjalankan perannya masing-masing, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai evaluasi, sedangkan pembelajaran dilaksanakan oleh instruktur dari Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Selain itu, koordinasi yang dilakukan antara Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan LPK memungkinkan pelaksanaan pelatihan tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang sudah ditetapkan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program didukung oleh sumber daya manusia dan infrastruktur yang tersedia dan tentunya sudah terverifikasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Pegawai Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung bertugas pada bidang administrasi, koordinasi, monitoring, dan evaluasi, sedangkan Instruktur LPK berperan dalam penyampaian materi dan praktik

pelatihan. Fasilitas pelatihan yang disediakan LPK juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan setiap jenis pelatihan. Namun, jumlah sumber daya manusia yang tersedia belum sepenuhnya sebanding dengan banyaknya paket pelatihan yang harus dikelola sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum dapat menjangkau seluruh kegiatan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana dan ketersediaan sumber daya menjadi faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Program Pelatihan Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dalam Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja di Kota Bandung.

3. Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik

Pembahasan mengenai kondisi ekonomi, sosial, dan politik diarahkan untuk melihat bagaimana faktor lingkungan memengaruhi implementasi Program Pelatihan Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Pada aspek ekonomi, pelaksanaan program disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sehingga kompetensi yang diberikan memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pasar kerja. Pelatihan diposisikan sebagai upaya membekali peserta dengan keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Akan tetapi, kompetensi yang diperoleh peserta belum sepenuhnya diikuti dengan pemanfaatan keterampilan tersebut dalam aktivitas ekonomi. Di sisi lain, keterbatasan pemantauan terhadap alumni menyebabkan kontribusi program terhadap penyerapan tenaga kerja maupun upaya menekan angka pengangguran belum dapat diidentifikasi secara menyeluruh.

Pada aspek sosial, pelaksanaan Program Pelatihan Kerja memperoleh penerimaan dari masyarakat yang tercermin melalui partisipasi peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan. Selama proses pembelajaran, peserta terlibat dalam setiap tahapan pelatihan dan memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan serta keterampilan baru. Pelatihan menjadi ruang bagi

masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri sesuai dengan kebutuhan dan peluang kerja yang tersedia.

Pada aspek politik, implementasi Program Pelatihan Kerja didukung oleh pemerintah daerah melalui penyediaan anggaran serta keterlibatan DPRD dalam penyelenggaraan pelatihan yang berasal dari aspirasi masyarakat. Dukungan tersebut diperkuat oleh regulasi yang menjadi landasan penyelenggaraan program, mulai dari pelatihan, pemagangan, sertifikasi kompetensi, hingga peningkatan produktivitas. Meskipun demikian, pemanfaatan program lanjutan masih dipengaruhi oleh keputusan peserta untuk mengikuti tahapan berikutnya serta persyaratan yang ditetapkan oleh dunia usaha.

4. Kecenderungan Pelaksana

Kecenderungan pelaksana dalam implementasi Program Pelatihan Kerja tercermin melalui komitmen aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam mengarahkan pelaksanaan program agar tetap berorientasi pada tujuan peningkatan kompetensi masyarakat. Pelaksanaan program tidak hanya dipahami sebagai penyelenggaraan kegiatan pelatihan, tetapi juga sebagai upaya mempersiapkan peserta agar memiliki kompetensi yang dapat dimanfaatkan dalam memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembagian tugas sesuai struktur organisasi serta pelaksanaan fungsi pengendalian selama kegiatan berlangsung. Pengawasan yang dilakukan secara berkala terhadap administrasi pelatihan, kehadiran peserta, dan pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa proses implementasi tidak hanya berfokus pada penyelenggaraan program, tetapi juga pada upaya menjaga kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada tingkat pelaksana lapangan, kecenderungan implementor terlihat melalui keterlibatan langsung dalam mendampingi peserta selama proses pembelajaran. Pelaksana tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga memberikan arahan, demonstrasi praktik, serta pendampingan ketika peserta mengalami kesulitan. Selain itu,

koordinasi dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) tetap dilakukan apabila ditemukan kendala selama pelaksanaan kegiatan sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan perencanaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan pelaksana dalam implementasi Program Pelatihan Kerja ditandai oleh adanya komitmen untuk menjalankan tugas, melakukan pengawasan, serta memberikan pendampingan kepada peserta selama proses pelatihan berlangsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Program Pelatihan Kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dalam Meningkatkan Kompetensi Pencari Kerja di Kota Bandung telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan. Implementasi program didukung oleh adanya standar pelaksanaan yang jelas, koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) serta pihak terkait, pembagian tugas yang sesuai dengan fungsi organisasi, dan komitmen pelaksana dalam mengarahkan serta mengawasi jalannya program. Selain itu, penyelenggaraan pelatihan sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri sehingga memberikan kesempatan bagi setiap peserta untuk meningkatkan kompetensi sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun berwirausaha. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi program pelatihan kerja masih menghadapi beberapa kendala seperti komunikasi pasca pelatihan melalui pelaporan alumni belum berjalan secara optimal sehingga perkembangan peserta setelah mengikuti pelatihan belum dapat dipantau secara menyeluruh. Selain itu, pemanfaatan program lanjutan seperti pemagangan dan sertifikasi kompetensi masih dipengaruhi oleh keputusan peserta dan persyaratan yang ditetapkan oleh dunia kerja. Kondisi tersebut juga menyebabkan kontribusi program pelatihan kerja terhadap penyerapan tenaga kerja maupun upaya menekan angka pengangguran belum bisa diidentifikasi secara optimal.

Secara keseluruhan, implementasi Program Pelatihan Kerja telah berperan dalam meningkatkan kompetensi pencari kerja di Kota Bandung. Namun, optimalisasi pemantauan alumni, penguatan monitoring dan evaluasi, serta peningkatan pemanfaatan program lanjutan diperlukan agar implementasi kebijakan dapat memberikan manfaat yang lebih berkelanjutan bagi peningkatan kualitas tenaga kerja dan pencapaian tujuan pembangunan ketenagakerjaan di Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2024). *Kota Bandung Dalam Angka 2024*. Bandung: Badan Pusat Statistik Kota Bandung.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2025). *Kota Bandung Dalam Angka 2023-2025*. Bandung: Badan Pusat Statistik Kota Bandung.
- Bandung, P. D. (2018). *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan*. Bandung: Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. (2025). *Program Pelatihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Tahun 2025*. Bandung: Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.
- Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. (2025). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Tahun 2023-2025*. Bandung: Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.
- Nugroho, R. (2023). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Daerah Kota Bandung. (2018). *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan*. Bandung: Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- Pemerintah Daerah Kota Bandung. (2021). *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2021*. Bandung: Pemerintah Daerah Kota Bandung.

- Pemerintah Kota Bandung. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2024–2026*. Bandung: Pemerintah Kota Bandung.
- Salsabila; Hertati. (2022). Efektivitas Program Pelatihan Berbasis Kompetensi di UPTD BLK Kotawaringin Timur. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Sore dan Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Syahrudin. (2017). *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep; Teori dan studi Kasus*. Bandung: Nusa Media.
- World Economic Forum. (2025). *The Future of Jobs Report 2025*. Geneva: World Economic Forum.